

PSAP IMPLEMENTATION ANALYSIS No. 6 IN DKI PROVINCIAL GOVERNMENT INVESTMENT 2014-2020

ANALISIS PENERAPAN PSAP No. 6 DALAM INVESTASI PEMERINTAH PROVINSI DKI 2014-2020

Abubakar^{1a}

¹ Fakultas Ekonomi Institute Bisnis dan Informatikan Kosgoro
Indonesia.

^a Korespondensi: **Abubakar**, E-mail: abubakar00012248@gmail.com

(Diterima: 02-10-2022; Ditelaah: 03-10-2022; Disetujui: 12-01-2023)

ABSTRACT

This research is about the application of PSAP No. 6 in the long-term investment of the DKI Jakarta local government with four objectives to know and understand 1) the investment profile of the DKI Jakarta government, 2) what sectors the DKI Jakarta local government invests in, 3) how to invest in ownership and 4) how to apply PSAP No .6 in investment DKI Jakarta The research method used is descriptive method. The study results concluded that the investment profile within nine years of the Jakarta provincial government's investment increased and grew by 14.3 times. Capital investment in BUMD was at most 3.7% of the total investment, while 86.3% of capital investment was in third parties. The provincial government of DKI Jakarta invests in six business sectors, and the most significant sector is the construction sector at 35.9% and the transportation sector at 33.3% of the total investment. Investment ownership can be divided into three types, and the first is 100% share ownership specifically for BUMD status companies, as many as five companies. The second ownership, between 80%-99.9%, is capital investment in companies in the form of Limited Liability Companies. The third is a capital investment between 0-30% in private third parties, as many as seven companies. The local government has implemented PSAP No. 6 in the capital investment assessment using the cost and equity methods. Still, three irregularities in its application cause the value of the capital investment, one of which is an asset not to be seen in the Regional Government Financial Statements

Keywords: Investment Accounting, PSAP No. 6, Regional Owned Enterprises

ABSTRAK

Penelitian ini tentang akuntansi investasi pemerintah daerah DKI Jakarta dengan empat tujuan untuk mengetahui dan memahami 1) Profil investasi Pemda DKI 2) sektor apa saja investasi yang di masuki Pemda DKI Jakarta, 3) bagaimana kepemilikan investasi bagaimana dan 4) bagaimana penerapan PSAP No .6 dalam investasi DKI Jakarta Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian berkesimpulan bahwa profil investasi dalam waktu 9 tahun investasi pemerintah provinsi Jakarta semakin menaik dan tumbuh sebanyak 14,3 kali lipat, Penyertaan modal pada BUMD tidak lebih dari 3,7% dari total Investasi sementara 86,3% investasi modal pada pihak ketiga. Pemerintah provinsi DKI Jakarta berinvestasi dalam enam sektor bisnis dan sektor terbesar masing- masing bidang

konstruksi sebesar 35,9% dan dibidang transportasi sebesar 33,3% dari total investasi. Kepemilikan investasi dapat dibedakan menjadi tiga jenis pertama kepemilikan saham 100% khusus untuk perusahaan berstatus BUMD sebanyak 5 perusahaan, kedua kepemilikan antara 80%-99,9% adalah investasi modal pada perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas dan ketiga investasi modal antara 0-30% Investasi modal pada pihak ketiga swasta sebanyak 7 perusahaan. Pemda telah menerapkan PSAP No. 6 dalam penilaian investasi modal dengan metode biaya dan metode ekuitas tetapi terdapat tiga ketidaklaziman dalam penerapannya yang menyebabkan nilai investasi modal salah satunya aset tidak terlihat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kata Kunci : Akuntansi Investasi, PSAP, Keuangan Daerah

Abubakar. (2023). Analisis penerapan PSAP no 06 dalam investasi pemerintah provinsi DKI 2014-2020. *Jurnal Sosial Humaniora*, 14(1), 15- 34.

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya otonomi daerah tanggal 01 Januari 2001, telah membawa implikasi yang banyak dan luas (Kustianingsih and Muslimin 2018 Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.(Akbar, 2016) (Mutiha, 2016) oleh karenanya dengan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan, perbaikan pengelolaan sumberdaya yang dimiliki setiap daerah (Pangerapan and Wokas 2016, 733) dan mandiri dalam bidang keuangan (Kustianingsih and Muslimin, 2018) serta lebih aktif dan leluasa dalam melakukan pembiayaan dalam upaya pengembangan aktifitas program-program pembangunan di daerah. (Susantao and Hery, 2010) Otonomi membuat penyelenggaraan pemerintahan berubah dari sentralistik birokratis menjadi desentralistik parsitipatoris (Kustianingsih, Muslimin 2018,) dan daerah terpacu mencari sumber-sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran pembangunan daerah (Puspitasari 2015) oleh karenanya riset ini dilaterbelakangi adanya yaitu tujuan

otonomi daerah hingga laporan keuanfab kurang transparan.

Tujuan otonomi daerah adalah kemandirian ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut (Dermawan and Akim, 2020) meningkatkan pelayanan khususnya di sektor publik dan mampu mengelola keuangan daerah secara optimal.(Miftahul and Rahayu 2018) dan mampu membuka peluang memajukan daerah dan menumbuh kembangkan seluruh potensi serta mampu memainkan peranan dalam membuka peluang memajukan daerah dan mampu menetapkan belanja daerah secara wajar, efisien dan efektif ,meningkatkan kinerja (Pangerapan and Wokas 2016). Otonomi adalah kekuasaan penuh sebagaimana keputusan konsumen untuk memilih produk atau jasa yang dibutuhkan.(Andriyanty and Wahab 2019, 285). Dari sisi pemerintah tujuan otonomi daerah adalah yaitu : (1) Untuk mewujudkan political equality, yaitu membuka kesempatan dan berpartisipasi masyarakat dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal atau daerah. (2) menciptakan local accountability, yaitu meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak masyarakat.(3) mewujudkan local responsiveness, yaitu mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah yang muncul (Purpitasari, 2015).

Pelaksanaan otonomi daerah ditandai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan sehingga daerah memiliki kewenangan untuk belanja-belanja daerah yang tercantum dalam anggaran daerah (Kusnandar and Siswanto 2018) dan satu indikator keberhasilan otonomi daerah adalah kemandirian keuangan daerah (Rinaldi 2012) Ukuran keberhasilan keuangan akan terlihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab. (As Syifa Nurilah 2014, 3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan rencana keuangan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Provinsi dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah (Kusnandar and Siswanto, 2018) dan merupakan gambaran atau tolok ukur keberhasilan daerah di dalam meningkatkan potensi perekonomian daerah. (Rinaldi 2012, 102) Keberhasilan keuangan daerah akan terlihat dari laporan keuangan dan Laporan keuangan menjadi alat yang digunakan untuk menunjukkan kinerja dan pelaksanaan fungsi pertanggungjawaban dalam suatu entitas. (Mokoginta and Lambey 2017) Laporan keuangan pemerintahan daerah terdiri: neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. (Mutih, 2016) Laporan Neraca adalah laporan posisi keuangan yang menggambarkan posisi aset, hutang dan modal (Riswan and Fatrecia 2014, 96) atau bisa juga disebut sebagai potret atau gambar dari posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dimiliki pemerintah daerah pada tanggal laporan. (Hedi et al. 2016) Pemerintah Provinsi DKI telah menyajikan laporan keuangan, dan telah mengumumkan ke publik. Laporan keuangan adalah sesuatu yang amat penting (Mayasari and Ariani, 2021) karena di dalam laporan tersebut tertera jumlah

investasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam bentuk investasi Non permanen maupun permanen. Investasi permanen pada umumnya penyertaan modal pada perusahaan daerah mulai dari PD Air minum hingga PD penjamin Kredit Daerah. Perusahaan daerah pada umumnya berbentuk perseroan terbatas. Perseroan Terbatas merupakan badan hukum. Ciri utama badan hukum adalah pemisahan antara harta kekayaan badan hukum dan harta kekayaan pribadi pemegang saham Menurut UU NO 32 tahun 2017 (Sinaga 2018, 19) dan didirikan oleh sekurang-kurangnya dua pendiri, apakah orang perorangan ataupun badan hukum, (Yani and Mansur, 2020) yang tanggung jawab hanya sebagai pemegang saham, anggota Direksi dan Komisaris. (Sinaga 2018, 18) Pemerintah Provinsi DKI telah melakukan investasi kedalam Perseroan Terbatas yang terus meningkat. Sebagaimana tercatat di dalam Laporan Neraca Pemerintah Provinsi DKI Data berikut posisi investasi Pemerintah Provinsi DKI Sejak tahun 2015 hingga 2020.

Tabel 1. Investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2020 Dalam Jutaan Rupiah.

No	Tahun	Non permanen	Investasi Permanen	Jumlah	Total Asset
1	2015	409.863	22.098.228,1	22.508.090,7	421.061.389,5
2	2016	70.645	28.538.235,8	28.608.880,0	442.977.223,0
3	2017	3.136.606	40.818.731,9	43.955.337,6	464.601.747,1
4	2018	4.712.278	47.246.004,7	51.958.283,1	492.902.439,2
5	2019	349.986	61.060.348,6	61.410.334,2	517.155.089,7
6	2020	350.001	66.616.669,8	66.966.670,3	520.360.899,9

Penyajian laporan keuangan yang dilakukan pemerintah daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (Mole, 2015) Dan memenuhi prinsip prinsip-prinsip tepat waktu dan

disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sejalan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 (As Syifa Nurilah, 2014) serta handal (Dewi and Mimba 2014, 445) yang bertujuan menyajikan informasi keuangan yang dibutuhkan para pengguna laporan keuangan. (Suranta, 2015) Penyajian investasi di dalam laporan dapat menggunakan beberapa pendekatan penilaian investasi apakah didasarkan harga perolehan atau didasarkan metode ekuitas. Setandar Akuntansi Pemerintahan No.6 Telah mengatur tatacara penilaian investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah tapa terkecuali Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Besarnya investasi biasanya dipengaruhi oleh persepsi prospek bisnis ke depan (Prihanto and Damayanti 2022, 32). Investasi adalah mengorbankan aset yang dimiliki sekarang untuk mendapatkan aset pada masa yang akan datang dengan jumlah yang lebih besar. (Sartini and Purbawangsa, 2014) (Rasuma Putri and Rahyuda 2017) Investasi merupakan tindakan penanaman dana saat ini kedalam bentuk aktiva lancar ataupun aktiva tetap dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang (Sartini and Purbawangsa 2014) dan besarnya tergantung pada pengeluaran-pengeluaran yang ditetapkan manajemen di masa yang akan datang. (Hidayat 2010,)

Dari tabel tersebut dapat dipahami bahwa 1 setiap tahun investasi semakin meningkat sampai akhir tahun 2020 tercatat sejumlah 66,9 trilyun Rupiah, kenaikan investasi daerah dalam waktu delapan tahun berjumlah Rp 55,9 trilyun dan rata-rata kenaikan investasi dalam kurun waktu delapan tahun sejumlah Rp 7,9 trilyun atau tidak kurang dari 30,2%. Atas dasar data diatas maka dapat ditarik permasalahan Bagaimana Penyajian Akuntansi Investasi sesuai dengan PSAP No. 6 di dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2013-2020. Dan dari permasalahan tersebut dapat

diturunkan menjadi bagaimana pencatatan investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Bagaimana penilaian harga pokok investasi, bagaimana Pencatatan hasil investasi Pemerintah daerah.

Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Alfiani Purnama dan Siswanto tahun 2018 tentang Penerapan Akuntansi Investasi Jangka Panjang Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun anggaran 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses implementasi akuntansi investasi Pemerintah Kabupaten Sleman secara umum sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan namun dalam pengungkapannya masih terdapat hal-hal yang belum dijelaskan secara rinci.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Heri Sugianto pada tahun 2020 tentang Analisis Investasi Pemerintah Pusat pada Lembaga Keuangan Internasional yang berkesimpulan dalam kurun waktu tahun 2004 sampai dengan tahun 2019 penanaman modal pemerintah tersebut tidak menghasilkan pendapatan dalam bentuk dividen, bunga, atau bentuk pendapatan tetapi berdasarkan nota keuangan pemerintah tahun 2020, pemerintah memperoleh manfaat sosial dari penanaman modal tersebut.

Badan Usaha Daerah

Dalam rangka menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan untuk membentuk. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Yani and Mansur 2020, 365) BUMD diharapkan dapat menjadi alat Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan fasilitas publik bagi masyarakat. (Bintari and Pandiangan, 2016) Pasal 1 angka 1 PP No. 54 Tahun 2017 menegaskan bahwa karakteristik utama BUMD adalah pada kepemilikan saham dimana daerah harus menjadi pemegang seluruh saham perusahaan (Yani and Mansur 2020) yang

dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Perlu dipahami Undang-Undang PT yang ada sekarang tidak mengatur secara khusus berkenaan perseroda, berbeda dengan persero yang diberikan pengkhususannya, terutama berkenaan dengan pendiriannya tetapi ayat (7) undang-undang tersebut memberikan peraturan khusus pendirian PT hanya oleh satu pendiri, hanya untuk perseroan terbatas yang didirikan oleh negara, yang disebut dengan Persero. (Yani and Mansur 2020) artinya pasal tersebut memberikan ruang berdirinya perseroan yang didirikan oleh negara.

Perlu dipahami bahwa Pengertian Perseroan terbatas berasal dari kata "perseroan" yang merujuk pada modalnya yang terdiri atas sero (saham) dan kata "terbatas" merujuk pada pertanggungjawaban pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang dimiliki (Purnamasari, and Gunarto Gunarto, 2018.) Karakteristik umum perseroan terbatas adalah ekuitas dalam bentuk Modal/saham, kekayaan perusahaan terpisah dari para perseroannya, memiliki tanggung jawab pada modal yang dimiliki, pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau direksi, memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas, kekuasaan tertinggi ada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). (Sinaga 2018, 18) Dan adanya hak dan kewajiban yang tertera di "Anggaran Dasar" perseroan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat 1 (Rambing 213AD, 73) Adapun tujuan pemisahan harta kekayaan perusahaan dengan pemilik adalah agar lembaga kegiatan Perseroan Terbatas sebagai salah satu unit usaha dan badan hukum dapat dijalankan secara produktif, berkualitas dan efisien. Sementara ciri Perseroan Terbatas untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, dimana para pemegang saham (persero) ikut serta

mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama bersama, dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan tersebut (Sinaga, 2018) Kelebihan Perseroan Terbatas pemilik modal tidak harus ikut dalam pengelolaan perusahaan, mereka bisa menunjuk orang lain di luar pemilik modal untuk mengelola perusahaan tersebut. Keuntungan dibandingkan dengan bentuk badan hukum lain adalah lebih mudah mendapatkan tambahan modal; modal dikelola lebih efisien karena manajemen spesialisasinya memegang saham, mereka dapat mengalihkan kepada orang lain. (Sinaga 2018, 18) (Purnamasari, and Gunarto Gunarto 2018).

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi

Laporan keuangan adalah laporan akuntansi utama yang mengkomunikasikan informasi keuangan (Suaidah, 2017) berupa catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi (As Syifa Nurilah 2014) dan dihasilkan oleh disiplin ilmu akuntansi. (Wati and Sinarwati 2014) Laporan Keuangan merupakan sumber informasi (Puspitasari et al. 2017) yang seharusnya bisa diakses bagi yang membutuhkan terutama yang sudah di audit (Mutiha 2016) sebagai sarana acuan dalam pengambilan keputusan bagi pihak yang berkepentingan (Suaidah 2017) . dan sebagai laporan atas anggaran tahunan ,(Fazlurahman and Jauhari 2020) serta hasil dari proses pelaporan keuangan kuantitatif-kuantitatif, informasi tentang posisi keuangan perusahaan selama periode tertentu. (Fazlurahman, and Jauhari 2020) dan sebagai alat untuk mengurangi tekanan dari masyarakat. (Fatwara, Hasibuan, and Nursalam 2022, 58). Laporan keuangan merupakan media untuk menilai kinerja keuangan. (Farida

and Nugraha 2019,) Laporan keuangan Pemerintah Provinsi sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.01 (2010 : 48) terdiri dari “Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.(Khafiyya, n.d., 5) (Harahap 2020),).

Laporan Neraca adalah salah satu bagian dari laporan keuangan (Triharyati and Nursita 2020) yang menggambarkan posisi keuangan posisi aset, kewajiban dan ekuitas pada saat tertentu dan merupakan status *report* bukan merupakan *flow report* (Riswan and Kesuma 2014) yang memuat informasi yang disusun secara sistematis tentang aset lancar, aset tetap dan penyusutannya, kewajiban serta modal dan merupakan suatu gambaran kondisi keuangan dari suatu institusi (Aini et al. 2019) serta acuan yang digunakan untuk melihat kondisi dan perkembangan suatu entitas.(Ariesta and Nurhidayah, 2020,) Dan pertanggungjawaban dewan manajemen kepada anggota organisasi (Zulkifli And Rahmawati, 2019).

Laporan operasional mencerminkan kemampuan operasi suatu daerah.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 6 dan Investasi Daerah

PSAP No 6 mengatur tentang akuntansi Investasi berbasis akrual. Tujuan standar tersebut untuk mengatur perlakuan akuntansi investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya Yang harus disajikan. Ruang lingkup standar ini disebutkan, ketiga mengatur investasi pusat maupun daerah jangka pendek dan jangka panjang. Bentuk investasi yang boleh dilakukan pemerintah adalah pembelian surat berharga dan instrumen ekuitas. Pernyataan ini juga mengatur diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi

jangka pendek dan investasi jangka panjang. Dan yang paling pokok mengatur metode penilaian investasi apakah didasarkan didasarkan atas biaya atau ekuitas. Atas dasar biaya jika kepemilikan saham dibawah 20% maka diklasifikasikan sebagai metode perolehan atau sesuai biaya yang dikeluarkan dan diatas 20% diklasifikasikan sebagai metode ekuitas.

Pengakuan hasil investasi

Investasi pemerintah daerah dalam jangka panjang yang diharapkan mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, dan lainnya dalam jangka waktu tertentu (Nurhayati, 2015). Menurut Peraturan Mendagri No 52 tahun 2012 pasal 1 ayat 7 adalah “Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara”. Investasi pemerintah, pada umumnya diharapkan sebagai penggerak peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.(Purnamasari, 2017). Investasi daerah adalah penggunaan anggaran pemerintah untuk mendanai kegiatan yang dengan waktu lebih dari satu tahun anggaran (Buana, Saragih, and Aritonang 2019, 11) dan ditujukan untuk pembentukan menyediakan barang publik (Maisaroh and Risyanto, 2018). Tujuan investasi untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, Meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Buana and Aritonang 2019,) Sementara menurut Peraturan Mendagri No 52 tahun 2012 adalah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/ atau manfaat lainnya.

Modal dalam Saham

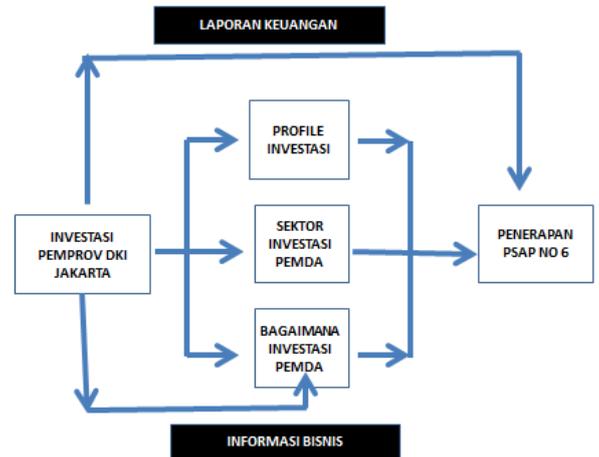
Modal yang dimiliki biasanya di tentukan oleh jumlah saham yang dimiliki. and Fairuzzaman, 2021). Modal merupakan faktor yang sangat penting artinya. (Purnamasari, and gunarto, 2018,) Modal adalah salah satu faktor produksi yang dibutuhkan sebagai sumber pendanaan jangka panjang (Susmonowati 2018, 73) dan sering juga disebut sebagai hak residual atau kepentingan pemilik atas aset yang dimiliki sesudah dikurangi kewajiban. (Ariesta and Nurhidayah 2020, 201) Dalam Pasal 32 ayat (1) UUPT 2007 terdapat pengaturan mengenai batas minimal dari modal dasar perseroan, kurang atau lebih dari jumlah tersebut tidak diperbolehkan. Untuk modal ditempatkan juga ada batas minimal yang dicantumkan dalam Pasal 33 ayat (1) UUPT 2007. yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, harus ditempatkan. Kemudian untuk modal disetor berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UUPT 2007 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUPT 2007 dan penjelasannya harus disetor penuh, maksudnya adalah jika modal ditempatkan 50% dari modal dasar, maka modal yang harus disetor penuh 50% dan tidak dapat diangsur. (E. Purnamasari, and gunarto Gunarto 2018)

Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian Pemprov. DKI Jakarta diambil bersumber dari laporan keuangan pemda DKI Jakarta tahun 2013 hingga tahun 2020. Apek yang akan dianalisis adalah profil investasi, Sektor investasi di sektor apa saja dan kemana dan bagaimana investasi tersebut serta bagaimana penerapan PSAP No 6 untuk tiga aspek tersebut Apa saja yang dimasuki. Penelitian ini mengandalkan sumber informasi dari laporan keuangan Pemda DKI yang telah diaudit dan dari berbagai informasi bisnis dari lembaga yang kredibel. Pembahasan penelitian pada investasi Pemprov DKI di fokuskan pada profile investasi yang

dimasuki pada sektor apa saja, Kedua sektor apa saja yang menjadi prioritas investasi dan Proses investasi yang dilakukan.

Apa bila disajikan dalam bentuk gambar akan tampak sebagaimana dibawah ini



Gambar 1. Kerangka Penelitian

MATERI DAN METODE

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif sebagaimana dilakukan Riyanti dan Pranawungkur serta Riyantie (Riyantie, and Pranawukir 2021,). di laksanakan di Jakarta. (Andriyanty, 2019) Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder (Andriyanty and Wahab, 2019). Data primer adalah adalah laporan tahunan (Mayasari and Yulianto 2022) Yang telah di audit (Damayanty, and Fairuzzaman, 2021) dan PSAP No. 6. Sementara data sekunder adalah teori dan konsep serta jurnal hasil penelitian sebelumnya yang masih ada hubungannya dengan akuntansi sektor publik dan laporan keuangan serta keuangan daerah dan berbagai peraturan yang berkaitan lainnya. Penelitian deskripsi ini, peneliti mencoba mengkomputasi data primer (laporan keuangan) dan membandingkan dengan berbagai peraturan dan akuntansi keuangan serta teori akuntansi sektor publik dan konsep investasi.

PSAP Nomor 6

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara ditetapkan setiap tahun sesuai undang-undang yang terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.(Bakar, 2022) (Rahmayanti 2016) Undang-undang tersebut mengharuskan presiden, gubernur atau bupati dan Walikota menyampaikan laporan kepada DPR/DPRD.(Bakar, 2022) (Albugis, 2016) Untuk itu pemda wajib menyampaikan laporan keuangan terdiri dari mulai dari Laporan Realisasi Anggaran hingga Laporan Perubahan Ekuitas (Bakar, 2022)

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 6 tahun 2008 telah mengatur perlakuan akuntansi investasi pemerintah meliputi saat pengakuan, kalsifikasi investasi, penilaian investasi dan pengungkapan pada laporan keuangan. Dalam pernyataan tersebut investasi dibedakan menjadi investasi jangka pendek (surat berharga) dan investasi jangka panjang (penyertaan modal). Penyertaan modal dalam bentuk investasi harus dinilai dengan dua metode menjadi metode biaya dan metode ekuitas. Penggunaan metode biaya didasarkan pada kepemilikan dibawah 20%. Sementara metode ekuitas digunakan jika kepemilikan investasi modal berkisar antara 20%-50% tetapi kepemilikan yang kurang dari 20% namun mempunyai pengaruh yang signifikan masih menggunakan metode ekuitas. Untuk kepemilikan diatas 50% tetap menggunakan metode ekuitas.

Investasi

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 tahun 2012 mengatur Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Dalam peraturan tersebut dijelaskan investasi dimaksud dalam bentuk investasi dalam surat berhagai atau investasi

langsung (pasal 9) dengan cara pembelian saham dan pembelian surat hutang (pasal 10). Biaya perolehan investasi surat berharga menurut PSAP No.6 dicatat sebesar harga perolehan ditambah komisi perantara, biaya bank dan biaya lainnya. Paragraf 16 halaman 7 menyebutkan perlunya penilaian Investasi yang didasarkan atas tiga metode yaitu metode biaya, metode ekuitas dan Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Dalam ketentuan 37 tidak semua metode tersebut tidak bisa diterapkan untuk semua kepemilikan investasi. Kepemilikan kurang 20% dicatat dengan menggunakan metode biaya dan 20%-50% menggunakan ekuitas dan diatas 50% menggunakan metode ekuitas.

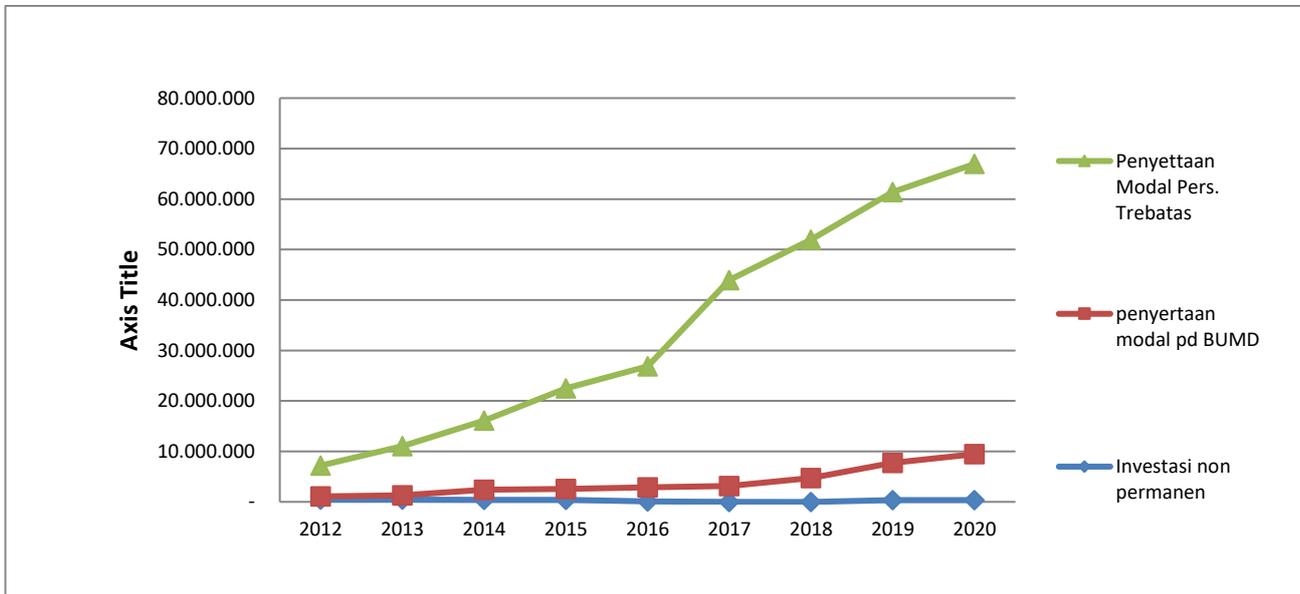
HASIL DAN PEMBAHASAN

Performa Investasi

Data investasi Jangka Panjang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2013-2020 memperlihatkan jumlah yang selalu meningkat dari tahun-ketahun. Investasi Permanen pada tahun 2013 berjumlah 11,05 trilyun Rupiah dan pada tahun 2021 sudah menjadi 66,61 Trilyun dan prosentase investasi terhadap aset juga semakin meningkat dari 2,6% menjadi 12,8%. Gambar di halaman berikut memberikan informasi tersebut terlihat bahwa Pertama investasi yang dilakukan pemerintah Provinsi Jakarta semakin lama semakin menaik, bukan hanya pada penyertaan modal terbatas melainkan pada penyertaan modal pada Perusahaan Daerah (PD). Investasi daerah bergerak dari 635,15 milyar rupiah pada tahun 2012 hingga menjadi 9,11 trilyun rupiah pada tahun 2020. Atau dalam kurun waktu 9 tahun investasi pemerintah DKI pada BUMD dapat meningkat sebanyak 14,3 kali lipat. Ini berbeda dengan investasi pada Perseroan Terbatas yang hanya sebesar 9,4 kali dan bila diukur secara total

investasi maka kenaikan tersebut tidak kurang dari 9,3 kali.

Apabila disajikan dalam bentuk grafik, informasi investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tampak sebagaimana di bawah ini



Gambar 2. Profile Investasi Pemerintah Provinsi DKI

Kedua, Investasi non permanen dalam kurun waktu 9 tahun memperlihatkan bahwa prosentase terbesar terhadap total investasi terjadi 2012 sebesar 6,20% dan paling kecil 0,00% yang terjadi pada tahun 2007 dan 2008. Rasio rata-rata investasi non permanen terhadap total investasi dalam kurun waktu 9 tahun tidak lebih 1,8%. Secara indeks memperlihatkan jumlah yang makin lama makin mengecil mulai dari 100% tahun 2012 hingga 79% di tahun 2020. Jumlah ini menggambarkan jumlah investasi tahun 2012 merupakan jumlah investasi non permanen yang paling tinggi. Dari sisi pertumbuhan Investasi non permanen terlihat mengalami penurunan atau kenaikan yang cukup tajam. Penurunan tertinggi sebesar 339,3 milyar rupiah yang terjadi pada tahun 2016 dan penurunan terendah terjadi pada tahun 2013 sebesar 2,04 milyar rupiah sementara kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar Rp 348,81 milyar

rupiah dan kenaikan terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 15 juta rupiah

Ketiga, Penyertaan Modal Pada BUMD memperlihatkan kenaikan yang paling tinggi diantara jenis-jenis investasi lain mulai dari 635,1 milyar rupiah hingga 3,64 trilyun rupiah walaupun secara nominal jauh masih dibawah investasi penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada perseroan terbatas. Dalam kurun waktu 9 tahun kenaikan investasi pada BUMD meningkat 14 kali lipat. Dilihat dari jumlah rasio investasi terhadap total investasi memperlihatkan jumlah yang fluktuatif tetapi secara rata-rata tidak kurang dari 10%. Rasio tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebanyak 14% dan dan terendah pada tahun 2017 sebesar 7%. Bila diukur dengan pendekatan indeks terlihat tidak pernah sekalipun dalam keadaan menurun dan puncaknya pada tahun 2020 indeks menunjukan diangka 1435% yang berarti dalam waktu sembilan tahun investasi untuk BUMD

telah meningkat sebanyak 14,35 kali lipat sehingga wajar apabila indeks rata-rata sebesar 5,7 kali lipat. Dari sisi pertumbuhan. Dalam hal pertumbuhan, terlihat kenaikan investasi terhadap BUMD paling besar terjadi pada tahun 2019 sebesar 2,6 trilyun rupiah. Penyebab kenaikan investasi untuk PD Pembangunan Sarana Jaya sebesar Rp 2,2 trilyun. Kenaikan di urutan kedua terjadi pada tahun 2020 sebesar Rp 1,7 trilyun yang disebabkan oleh kebutuhan investasi di PDAM Jaya dan tambahan investasi di PD Pembangunan Sarana Jaya masing-masing 700,5 milyar rupiah dan 931,3 milyar rupiah.

Ke empat, investasi penyertaan modal pada perseroan terbatas menyerap jumlah yang paling besar karena kebutuhan pembangunan daerah. Tercatat 19 perusahaan mulai dari PT Pembangunan Jaya hingga PT Penjaminan Kredit Daerah. Jumlah Investasi bergerak mulai dari 6,1 trilyun rupiah pada tahun 2012 hingga 53,6 trilyun rupiah pada tahun 2020. Jumlah tersebut tidak pernah kurang dari 85% dari total investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepanjang 9 tahun. Rasio Investasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 93% dan terendah terjadi pada tahun 2012 dan 2014 masing-masing 85%. Rata-rata rasio investasi pertahun tidak kurang dari 88%. Penyerapan tertinggi pada PT Jakarta Propertindo sebesar Rp 18,5 trilyun dan PT Mas Rapid Transport Jakarta sebesar 17,35% pada tahun 2020. Dari sisi Indeks terlihat bahwa tidak pernah terjadi penurunan indeks baik didasarkan tahun dasar ataupun tahun sebelumnya mulai dari 100% pada tahun 2012 hingga 942% yang artinya dalam waktu sembilan tahun kenaikan investasi pada perseroan terbatas sebanyak 9,4 kali lipat dan bila dirata-ratakan tidak kurang 496% atau 4,9 kali lipat pertahun. Walaupun rasio indeks tersebut masih lebih kecil daripada indeks investasi di BUMD tetapi secara nominal besarnya investasi pada perseroan terbatas

sebanyak 6,3 kali lipat (57,5 : 6,1 trilyun). Sepanjang tahun 2012 hingga 2020 terjadi 9 kali kenaikan dimana kenaikan rata-rata pertahun sebesar Rp 5,7 trilyun rupiah. Kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2017 sebesar Rp 16,79 trilyun yang diserap oleh PT Jakarta Propertindo sebesar 9,6 trilyun rupiah, PT Mas rapid Transport

Sektor Investasi

Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan (Susmonowati 2018, 104). Pencatatan investasi dibedakan menjadi dua bagian apakah menggunakan metode biaya atau metode ekuitas (PSAP No 6 paragraf 1-7). Penyajian investasi di dalam Laporan Neraca dibedakan menjadi dua bentuk yaitu investasi non permanen dan investasi permanen. Investasi permanen dibedakan menjadi dua bagian yaitu Penyertaan Modal Pada BUMD dan Penyertaan Modal Pada PT Patungan. Di dalam penyertaan modal pada PT Patungan tidak memisahkan apakah metode pencatatan investasi berdasarkan metode harga perolehan ataupun metode ekuitas. Posisi investasi pada BUMD dan PT Patungan memperlihatkan dari tahun 2012 hingga tahun 2020 jumlah modal yang disertakan dalam perusahaan patungan selalu lebih besar dari pada penyertaan modal pada BUMD tetapi secara rasio memperlihatkan bahwa porsi investasi Pemerintah Provinsi DKI pada BUMD semakin lama semakin besar dan ini berbeda dengan penyertaan modal pada PT Patungan yang terjadi sebaliknya. Pada tahun 2012 penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI pada PT patungan sebesar 90,8% dari total investasi permanen tetapi pada tahun 2020 menjadi 86,32%. Secara rinci Penyajian Investasi Permanen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Laporan Neraca sebagaimana di tabel berikut.

Tabel 2. Investasi Modal pada BUMD dan PT Patungan Tahun 2014-2020.

Per Desember	Jumlah Modal pada BUMD	Jumlah Modal PT Patungan	Penyertaan	Jumlah	Rasio BUMD terhadap total investasi
tahun 2014	2.009.706.683.105	13.688.192.591.145		15.697.899.274.250	12,8%
tahun 2015	2.142.266.203.893	19.955.961.932.715		22.098.228.136.608	9,7%
tahun 2016	2.795.285.038.498	24.028.449.810.687		26.823.734.849.185	10,4%
tahun 2017	3.135.605.683.738	40.818.729.899.250		43.954.335.582.988	7,1%
tahun 2018	4.712.103.732.344	47.245.004.733.445		51.957.108.465.789	9,1%
tahun 2019	7.402.981.930.663	53.657.366.763.111		61.060.348.693.774	12,1%
tahun 2020	9.113.409.748.936	57.503.260.066.988		66.616.669.815.924	13,7%

Dari data tersebut investasi pemda selalu lebih kecil dari pada investasi patungan walaupun pada tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya tetapi kenaikan tersebut hanya terpaut kecil dibanding tahun 2014. Dalam waktu tujuh tahun investasi ke

BUMD meningkat empat kali lipat dalam kurun waktu 8 tahun meningkat 4,54 kali lipat dan investasi patungan juga meningkat sebanyak 4,20 kali lipat. Dan apabila diklasifikasikan kedalam bentuk sektor perusahaan akan tampak sebagaimana tabel di bawah ini,

Tabel 3 Prosentase Sektor Investasi Yang Dimasuki Pemda DKI tahun 2020 dan sebelumnya.

Sektor	Tahun							
	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
pariwisata, hiburan dan hotel	5,1%	5,5%	4,3%	4,8%	7,2%	8,8%	11,6%	15,9%
Keuangan	14,4%	19,8%	17,3%	19,6%	28,8%	27,2%	28,2%	29,4%
Konstruksi	35,9%	44,8%	36,0%	36,8%	23,7%	24,4%	24,5%	18,4%
Perdagangan	4,9%	6,5%	5,9%	5,5%	8,4%	5,4%	7,1%	6,2%
Properti	6,3%	8,4%	7,2%	7,5%	10,7%	10,5%	12,7%	17,1%
Transportasi	33,3%	15,1%	29,3%	25,8%	21,2%	23,8%	16,0%	13,0%
Jumlah Investasi	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Dari tabel diatas dapat diketahui pemerintah provinsi DKI Jakarta memasuki 6 kelompok besar investasi. Sejak tahun 2013 berfokus pada sektor transportasi dan konstruksi sebagai upaya menyelesaikan permasalahan yang ada dan jumlahnya terus meningkat yang semula hanya 13% dari total investasi naik menjadi 33,3% untuk sektor transportasi. Begitu juga dengan pembagunan sarana dan prasarana yang terus berjalan investasi di perusahaan yang bergerak dibidang ini pada tahun 2013 sebesar 18% berkembang menjadi 35,9% pada tahun

2020. Sektor perdagangan dari tahun 2013 hingga tahun 2020 merupakan sektor yang paling kecil dimasuki kecuali pada tahun 2017 hingga 2019. Tahun tahun 2013 jumlah investasi sektor ini sebesar 6,2% dan pada tahun 2020 menjasi 4,9%. Sementara sektor pariwisata, hotel dan hiburan sebesar 5,1% .

Investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Investasi pemerintah Provinsi DKI sejatinya memperlihatkan performa yang baik. Performa adalah hasil yang telah diperoleh individu atau kelompok orang dalam suatu entitas (Fazlurahman and Jauhari 2020) sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku di setiap organisasi kerja. (Ardiana and Subaedi, 2010) Performa adalah kata lain dari kinerja yang merupakan suatu proses dimana organisasi mengevaluasi pelaksanaan kerja individu (Ilhami and Rimantho, 2017) yang juga menggambarkan keadaan perusahaan tersebut (Trianto et al. 2017) dan berfokus pada nilai perusahaan. (Wijyantini and Sari 2018). Kinerja keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kondisi

ekonomi yang tidak menentu dan tiba-tiba membuat banyak perusahaan gulung tikar (Hasibuan and Wahabsamad, 2022)

Investasi yang dilakukan pemerintah provinsi sDKI Jakarta dilakukan sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Besarnya investasi di bedakan menjadi tiga bagian. Pertama investasi modal yang jumlahnya 100% diperuntukkan untuk penyertaan modal pada berbagai perusahaan daerah (BUMD). Kedua, investasi sebesar 0% sampai 30% adalah penyertaan modal pada berbagai perusahaan swasta dan ketiga penyertaan modal pada perusahaan daerah dalam bentuk Perseroan Terbatas. Tabel dibawah ini menjelaskan besarnya investasi modal pada setiap perusahaan dan jenis perusahaan yang dimasuki

Tabel 4. Klasifikasi Investasi Berdasarkan Penerimaan Investasi

BUMD		Investasi pada perusahaan swasta (pihak ketiga)		Investasi pada perseroan terbatas	
Nama	Rasio Kepemilikan	Nama	Rasio Kepemilikan	Nama	Rasio Kepemilikan
PAM Jaya	100%	PT. Kawasan berikat Nusantara	26,85%	PT Pembangunan Jaya	38,80%
PD Dharma Jaya	100%	PT Cemani Toka	27,42%	PT Food Station	99,90%
PT Pembangunan Sarana Jaya	100%	PT Asuransi Bangun Askrida	4,45%	PT JIEP	50%
PD Pasar Jaya	100%	PT Jakarta Internasional EXPO	13,14%	PT Delta Jakarta	26,25%
PD Pal Jaya	100%	PT Grahasahari Suryajaya	13,14%	PT Propertindo Jakarta	99,90%
		PT Ratax Armada	28,00%	PT Bank DKI JAKARTA	99,90%
		PT Rumah Sakit Haji	51,00%	PT Jakarta Toursindo	99,36%
		PT Pakuan Internasional	1,4%*	PT Mass Rapid Transport	99,90%
				PT Penjaminan Kredit	98,70%

Metode Ekuitas

Metode Ekuitas digunakan jika Pemerintah Provinsi memiliki nilai investasi antara 20% -50% atau dibawah 20% tetapi memiliki pengaruh yang significant. Pencatatan investasi dengan

metode ekuitas dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah bagian laba atau dikurangi dengan bagian kerugian. (Sugiyanto 2020, 183) Dengan model ini jumlah investasi setiap akhir tahun akan mengalami fluktuasi sesuai dengan kinerja perseroan terbatas Metode ini digunakan sangat bergantung dari besar-kecilnya kepemilikan saham dan hak suara untuk

mempengaruhi kebijakan perusahaan (Mudjiyono 2012, 7). Pencatatan secara akuntansi dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah dengan mendebet investasi penyertaan modal PT X dan mengkredit aktiva yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pencatatan tersebut sebenarnya tidak beda dengan metode harga perolehan yang membedakannya hanya dalam perlakuan deviden dimana metode harga pokok pendapatan investasi dicatat sebagai

pendapatan deviden tunai sementara metode ekuitas mencatat sebagai investasi surat berharga.

Jumlah investasi dengan metode penilaian ekuitas memperlihatkan tahun 2014 hanya sebesar 5,76 trilyun rupiah dan akhir tahun 2020 naik lebih dari 10 kali lipat atau 57,2 trilyun rupiah. Tabel dibawah ini memperlihatkan jumlah investasi modal pada berbagai perusahaan yang dicatat dengan metode ekuitas.

Tabel 6 Pencatatan Penilaian Investasi Modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Metode Ekuitas tahun 2014-2020 (dalam jutaan)

No	Keterangan	2020	2018	2016	2014
1	PT Jakarta Propertindo	18.587.480	16.513.489	5.345.412	2.836.036
2	PT Bank DKI Jakarta	9.181.598	8.584.493	7.394.776	4.355.119
3	PT Jakarta Tourisindo	491.272	438.964	467.365	484.909
4	PT Mass Rapid Transit Jakarta	17.358.259	12.281.866	5.486.646	1.807.668
5	PT Transportasi Jakarta	4.833.260	2.942.054	193.897	693.538
6	PT Penjamin Kredit Daerah	427.376	408.496	297.567	54.655
7	PT Pembangunan Jaya	3.853.650	3.262.015	2.500.121	1.619.697
8	PT Food Station Tjipinang	560.617	490.335	370.392	51.784
9	PT Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung	115.686	258.018	161.076	151.414
10	PT Delta Djakarta Tbk	266.849	336.055	197.026	198.714
11	PT Pembangunan Jaya Ancol	1.532.709	1.434.717	1.222.911	1.093.370
12	PT Ratax Armada	0	0	0	26
Jumlah		6.329.511	5.781.140	4.451.526	3.115.005

Dari tabel diatas seharusnya PT Cimani Toka, PT Kawasanbeikat Nusantara dan PT Ratax Armada dan PR Rumah Sakit Haji (sebelum diserahkan ke Departemen Agama) di masukan kedalam kelompok perusahaan yang menggunakan metode ekuitas karena jumlah investasi modal Pemrov DKI Jakarta diatas 20% walaupun bukan sebagai pengendali. PT Ratax Armada sebesar Rp 28,0% mengalami kerugian terus menerus dan tahun 2014 dan 2013 aset yang dimiliki bernilai 26 juta rupiah tetapi setahun sebelumnya memiliki nilai Rp 364.099.431. Penurunan aset tersebut disebabkan penghapusan dalam aktiva Pemprov DKI yang artinya tidak memiliki aset sama sekali dianggap tidak memiliki

nilai termasuk tanah Pemrov yang menjadi lahan armada taksi yang salah satu pemegang sahamnya adalah Pemprov DKI Jakarta. Perusahaan yang dipimpin mantan pejabat di Pemda DKI Jakarta (Bisnis.com) semula dalam keadaan sehat dan sejak tahun walaupun akhirnya terus merugi

Melihat dari jumlah nominal investasi modal di PT Ratax Armada yang dilaporkan di laporan keuangan selalu bulat di tahun 2012, 2014 dan 2014, perusahaan ini diklasifikasikan dengan metode biaya untuk pengakuan investasi. Tetapi supaya bisa dihapus dalam pembukuan maka diklasifikasikan sebagai metode ekuitas. Kasus pengklasifikasian PT Ratax Armada ini berbanding terbalik

dengan yang terjadi di PT Grahasahari Suryajaya dimana nilai investasi modal Pemprov DKI Jakarta tidak pernah berkurang walaupun perusahaan tersebut dalam keadaan rugi.

Dari uraian diatas penelitian ini melengkapi temuan Alfiani Purnama dan Siswanto yang menyimpulkan adanya tidak terungkap informasi keuangan aset pemerintah daerah sementara penelitian ini menemukan adanya ketidaksinkronan dalam menggunakan metode penilaian investasi pemerintah provinsi. Penelitian ini tidak sejalan dengan hasil temuan yang dilakukan oleh Heri Sugianto pada tahun 2020 yang berkesimpulan pemerintah tersebut tidak mendapatkan manfaat ekonomi tetapi memperoleh manfaat sosial dari penanaman modal tersebut. Pemprov DKI Jakarta menerima manfaat ekonomi dalam bentuk deviden dan manfaat sosial dalam bentuk pelayanan kepada publik.

KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut dibawah ini Investasi jangka panjang pemerintah provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2013-2020 memperlihatkan jumlah yang selalu meningkat dari tahun ketahun. Tahun 2013 berjumlah 11,05 trilyun Rupiah dan pada tahun 2021 sudah menjadi 66,61 Trilyun Rupiah. Investasi pemerintah DKI pada BUMD dapat meningkat sebanyak 14,3 kali lipat dan investasi pada Perseroan Terbatas yang hanya sebesar 9,4 kali tetapi volume investasi dengan perbandingan 13,7 % dan 86,3% untuk Perseroan terbatas. Tahun 2014 merupakan jumlah investasi non permanen yang paling tinggi. Dari sisi pertumbuhan Investasi non permanen terlihat mengalami penurunan atau kenaikan yang cukup tajam. Penurunan tertinggi sebesar 339,3 milyar rupiah yang terjadi pada tahun 2016 dan penurunan

terendah terjadi pada tahun 2013 sebesar 2,04 milyar rupiah sementara kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar Rp 348,81 milyar rupiah dan kenaikan terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 15 juta rupiah.

Pemerintah provinsi DKI Jakarta memasuki 6 kelompok besar investasi. Sektor transportasi dan konstruksi sebagai upaya menyelesaikan permasalahan yang ada terus meningkat dari 13% tahun 2013 menjadi 33,3% untuk tahun 2020. Sektor pembangunan sarana juga menyerap jumlah investasi terbesar yang semula hanya 18% pada tahun 2013 menjadi 35,9% pada tahun 2020. Sektor perdagangan merupakan sektor yang paling kecil dimasuki dengan porsi sebesar 4,9%. Sementara sektor pariwisata, hotel dan hiburan sebesar 5,1% Investasi modal Pemprov DKI Jakarta dilakukan pada tiga jenis usaha yaitu Badan Usaha Milik Daerah, pada pihak ketiga dan pada perseroan terbatas bukan pihak ketiga. Banyak catatan tersendiri sehubungan dengan investasi pada pihak ketiga. Kepemilikan saham pada perusahaan jenis ini adalah 0-29% dan tidak semua penyertaan modal pada pihak ketiga berjalan mulus. PAM Jaya yang sebelumnya dikelola oleh swasta kini telah mengambil mengambil alih keempat aspek tersebut pada tahun 2019 Investasi di PT Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran sebesar 13 persen dan PT Cemani Toka yang saat ini dimiliki sebesar 26,85 persen dianggap tidak memberikan kontribusi yang positif. Pemprov DKI Jakarta yang masih menguasai 13.459 saham Pakuan Internasional yang dengan 3,36%. Gubernur DKI Jakarta saat itu Fauzi Bowo berencana menggelar divestasi untuk melepas seluruh saham sampai juli 2020, PT Grahasahari Suryajaya selama 5 tahun terakhir (2015) tidak pernah membukukan laba dan perusahaan ini menunggak pajak hingga Rp 6,5 Miliar dan PT Delta Jakarta Tbk Gubernur DKI Jakarta tetap berencana menjual saham perusahaan tersebut

walaupun memberikan deviden sebesar Rp 52,5 miliar. Kelima, PT Ratax Armada dalam keadaan merugi terus menerus sehingga dalam laporan keuangan 2020 tidak terlihat jumlah aset yang dimiliki. Artinya aset yang dimiliki tidak ada nilai sama sekali termasuk tanah pemda milik Pemprov DKI Jakarta yang seharusnya setiap tahun naik terus

Pelaksanaan PSAP No 6 terdapat tiga kesalahan utama yaitu kesalahan pengklasifikasian dan kedua kesalahan dalam penentuan metode pengakuan investasi. PT Kawasan Berikat Nusantara, PT Cemani Toka dan RS haji Indonesia (sebelum diserahkan ke Pemda DKI) diklasifikasikan sebagai perusahaan sekelompok dengan perusahaan yang memiliki investasi pemerintah provinsi dibawah 20%. Kedua adanya kesalahan dalam menentukan penilaian investasi yang seharusnya menggunakan metode ekuitas dicatat dengan menggunakan metode biaya untuk kedua perusahaan tersebut. Ketiga adanya penghapusan aset investasi untuk PT Ratax Armada dimana sebenarnya investasi modal tersebut dinilai dengan metode ekuitas tetapi secara nominal investasi dicatat dengan metode biaya (jumlah nominal investasi modal dalam keadaan bulat dan genap, metode ekuitas akan menghasilkan jumlah investasi modal selalu tidak bulat sesuai dengan laba atau rugi yang diperoleh). Metode ekuitas yang diterapkan pada sembilan perusahaan akan menyebabkan kepemilikan investasi modal akan berfluktuatif bahkan negatif. Berkaca pada PT Ratax Armada akankah PT JIEP dan Investasi di perusahaan yang lain akan mengalami hal yang sama dimana Aset Pemda yang diserahkan dalam penyertaan modal akan menurun seperti tanah, padahal pada kenyataannya nilai pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)-nya selalu naik. Jika mau konsisten Pemerintah Provinsi DKI sebenarnya bisa melakukan hal yang sama untuk PT Grahasahari Suryajaya, walaupun bertentangan dengan metode pengakuan investasi di PSAP No.6 .

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Qurotul, Untung Rahardja, Abdul Hamid Arribathi, and Nuke Puji Lestari Santoso. 2019. "Penerapan Could Accounting Dalam Menunjang Efektifitas Laporan Neraca Pada Perguruan Tinggi." *CESS (Journal of Computer Engineering System and Science)* 4 (1).
- Akbar, Surya. 2016. "Analisa Penetapan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Indragiri Hulu." *Jiaganis* 1 (1): 31-48.
- Albugis, febriana F. 2016. "Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara." *Jurnal EMBA* 4 (3): 78-89.
- Andriyanty, Reny. 2019. "Pilihan Konsumen Muda Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Dalam Negeri." *Jurnal Mediastima* 25 (2): 205-23. <https://bizfluent.com/info-8698883->.
- Andriyanty, Reny, and Dodi Wahab. 2019. "Preferensi Konsumen Generasi Z Terhadap Konsumsi Produk Dalam Negeri." *ETHOS (Jurnal Penelitian Dan Pengabdian)* 7 (2): 280-96. <https://doi.org/10.29313/ethos.v7i2.4694>.
- Ardiana, I.D.K.R, I.A Brahmayanti, and Subaedi. 2010. "Kompetensi SDM UKM Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja UKM Di Surabaya." *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan* 12 (1): pp.42-55. <https://doi.org/10.9744/jmk.12.1.p42-55>.
- Ariesta, Cindy, and Fitriyah Nurhidayah. 2020. "Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Neraca Berbasis SAK-ETAP Pada UMKM (Studi Kasus Pada Elden Coffee & Eatery)." *Jurnal Akuntansi* 9 (2): 194-203.

- <http://ejournal.stiemj.ac.id/index.php/akuntansi>.
- As Syifa Nurilah, dan Muid. 2014. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Akuntansi Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan." *Journal Of Accounting* 3 (2): 2337-3806.
- Bakar, Abu. 2022. "Pemodelan Pengukuran Kinerja Pemda Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Dalam Perspektif Pendapatan Asli Daerah Kota Wisata Dan Kota Bisnis." *Mediastima* 28 (1): 52-71.
- Bintari, Antik, and Landrikus Hartarto Sampe Pandiangan. 2016. "Formulasi Kebijakan Pemerintah." *CosmoGov* 2 (2): 220.
- Buana, Aria Langlang, Herlina Juni Risma Saragih, and Sovian Aritonang. 2019. "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Pemerintah, Investasi Swasta Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Pulau Jawa Tahun 2011-2015." *Jurnal Ekonomi Pertahanan* 4 (2): 1-20.
- Damayanty, Prisila -, Hendi Prihanto, and Fairuzzaman Fairuzzaman. 2021. "Pengaruh Good Corporate Governance, Kepemilikan Saham Publik Dan Profitabilitas Terhadap Tingkat Pengungkapan Corporate Sosial Responsibility." *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo* 7 (2): 1. <https://doi.org/10.35906/jep.v7i2.862>.
- Dermawan, Windy, Akim Akim, and Henike Primawanti. 2020. "Paradiplomasi Bandung Menuju Kota Wisata Halal." *Indonesian Perspective* 5 (2): 183-200. <https://doi.org/10.14710/ip.v5i2.34133>.
- Dewi, P Ayu Ratna, and Ni Putu Sri Harta Mimba. 2014. "Pengaruh Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Pada Kualitas Laporan Keuangan." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 8 (3): 442-57. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/8252>.
- Farida, Ai Siti, and Raden Faisal Maulana Nugraha. 2019. "Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang." *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara* 11 (2): 107-24. <https://doi.org/10.15575/jpan.v11i2.7644>.
- Fatwara, Medy Desma, Ahmad Nurdin Hasibuan, and L M Nursalam. 2022. "Analisa Faktor Corporate Social Responsibility Dipengaruhi Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan Dan Profitabilitas Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Indek LQ 45" 2 (1): 54-70.
- Fazlurahman, Faesal, Chandra Fatriananda, and Rifqie Jauhari. 2020. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandung Sebelum Dan Setelah Mendapatkan Opini WTP Dari BPK." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini* 11 (1): 56. <https://doi.org/10.36982/jiegm.v11i1.1062>.
- Harahap, Heri Faisal. 2020. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah." *Journal Of Ekonomi and Busines* 4 (1): 34-38. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.87>.
- Hasibuan, Ahmad Nurdin, and Abdul Wahabsamad. 2022. "Analisa Laporan Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Perusahaan PT Karya Indoe Selera Periode Tahun 2016-2020" 2 (1): 30-53.
- Hedi, Oleh, Ahmad Kudhori, Hedi Pandowo, and Negeri Madiun. 2016. "(Studi Empiris Di Pemerintah Kota Madiun)," 85-96.

- Hidayat, Riskin. 2010. "Keputusan Investasi Dan Financial Constraints: Studi Empiris Pada Bursa Efek Indonesia." *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan* 12 (4): 457-79. <https://doi.org/10.21098/bemp.v12i4.249>.
- Ilhami, Rizka Shoumil, and Dino Rimantho. 2017. "Penilaian Kinerja Karyawan Dengan Metode AHP Dan Rating Scale." *Jurnal Optimasi Sistem Industri* 16 (2): 150. <https://doi.org/10.25077/josi.v16.n2.p150-157.2017>.
- Khafiyya, Nida An. n.d. "Akuntansi Aset Tetap (PSAP 07) Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur."
- Kusnandar, and Dodi Siswantoro. 2018. "Pengaruh Dana Alokasi." *Beta Asteria*, 13-30.
- Kustianingsih, Nurafni, Muslimin, and Abdul Kahar. 2018. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah." *Katalogis* 6 (6): 82-91.
- Maisaroh, Mamai, and Havid Risyanto. 2018. "Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah Dan Tenaga Kerja Terhadap Pdrb Provinsi Banten." *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 1 (2): 206. <https://doi.org/10.14421/ekbis.2017.1.2.1049>.
- Mayasari, Kampono Imam Yulianto, Sarah Dzakiyyah Nur. 2022. "Corporate Governance Profitablity Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoide." *Jurnal Blogchain* 2 (1): 17-24.
- Mayasari, Mayasari, and Anggi Ariani. 2021. "Good Corporate Governance Dan Kinerja Perusahaan." *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia (JABISI)* 2 (2): 135-44. <https://doi.org/10.55122/jabisi.v2i2.297>.
- Miftahul Abid, Sri Rahayu, Wiwin Aminah. 2018. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal." *E-Proceeding of Management* 5 (1): 75.
- Mole, Dance. 2015. "Penerapan Akuntansi Ekuitas Pada Pemda Bitung." *Jurnal EMBA* 3 (3): 1059-1057.
- Mudjiyono. 2012. "Pengertian Investasi." *Jurnal STIE Semarang* 4 (2): 1-18.
- Mutiha, Arthaingan. 2016. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010 -2014." *Jurnal Vokasi Indonesia* 4 (2). <https://doi.org/10.7454/jvi.v4i2.101>.
- Novtania Mokoginta, Linda Lambey, Winston Pontoh. 2017. "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan System Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintaah." *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12 (2): 874-90.
- Nurhayati, Mafizatun. 2015. "Pengaruh Kemandirian Daerah, Investasi Pemerintah, Angkatan Kerja Dan Pendapatan Perkapita Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di 33 Provinsi Tahun 2008-2013." *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis* 1 (3).
- Pangerapan, Herly, and dan Heince R. N. Wokas. 2016. "Pajak Parkir Dan Pajak Air Tanah Sebagai Sumber." *Jurnal EMBA* 4 (1): 732-41.
- Prihanto, Hendi, and Prisila Damayanti. 2022. "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Keberlanjutan Usaha Biro Jasa Perjalanan Haji Dan Umrah." *Journal of Management and Business Review* 19 (1): 29-48. <https://doi.org/10.34149/jmbr.v19i1.314>.
- Purnamasari, Eka, Miftah Anshor, and gunarto Gunarto. 2018. "Alasan Pembuatan Dan Perubahan

- Ketentuan Terkait Modal Dalam Perseroan Terbatas." *Akta* 5 (1): 206.
- Purnamasari, Femei. 2017. "Pertumbuhan Ekonomi: Investasi Pemerintah Dan Manajemen Investasi Dalam Perspektif Islam (Studi Di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung)." *Jurnal Manajemen Indonesia* 17 (1): 13. <https://doi.org/10.25124/jmi.v17i1.859>.
- Purpitasari, Puput. 2015. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah." *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* Vol. 4 (11): 1-11.
- Puspitasari, Ratih, Mubyarto Mubyarto, Ratnawaty Marginingsih, and Anggo Rudi. 2017. "Analisa Laporan Keuangan Guna Mengukur Kinerja Keuangan PT Astra Internasional Tbk . Analysis of Financial Statement To Measure Financial Performance of PT Astra International Tbk." *Cakrawala - Jurnal Humaniora* Vol. 16, N (July): 22-30. <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala/article/view/1840/1426>.
- Rahmayanti, Anim. 2016. "Ananlisa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013." *EKA CIDA* 1 (1): 5.
- Raming, Nicky Yitro Mario. 213AD. "Syarat-Syarat Sahnya Berdirinya Perseroan Terbatas." *Lex Privatum*, 1 (2).
- Rasuma Putri, Ni Made Dwiwana, and Henny Rahyuda. 2017. "Pengaruh Tingkat Financial Literacy Dan Faktor Sosiodemografi Terhadap Perilaku Keputusan Investasi Individu." *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 9: 3407. <https://doi.org/10.24843/eeb.2017.v06.i09.p09>.
- Rinaldi, Udin. 2012. "Kemandirian Keuangan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah." *EKSOS* 8 (2): 105-13.
- Riswan, and Kesuma Yolanda Fatrecia. 2014. "Analisa Laporan Keuangan Sebagai Dasar Dalam Penilaian Kinerja Keuangan PT Budi Satria Wahna Motor." *Akuntansi Dan Keuangan* 5 (1): 93-121.
- Riswan, and Yolanda Fatrecia Kesuma. 2014. "Analisa Laporan Keuangan Sebagai Dasar Dalam Penilaian Kinerja Keuangan PT Budi Satria." *JURNAL Akuntansi & Keuangan* 5 (1): 93-121.
- Riyantie, Mayang, Alamsyah Alamsyah, and Iswahyu Pranawukir. 2021. "Strategi Komunikasi Pemasaran Kopi Janji Jiwa Di Era Digital Dan Era Pandemi Covid-19." *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 20 (2): 255-67. <https://doi.org/10.32509/wacana.v20i2.1721>.
- Sartini, Luh Putu Novita, and Ida Bagus Anom Purbawangsa. 2014. "Pengaruh Keputusan Investasi, Kebijakan Dividen, Serta Keputusan Pendanaan Terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis Dan Kewirausahaan* 8 (2): 81-91.
- Sinaga, Niru Anita. 2018. "Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 8 (2): 17-45. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/253>.
- Suaidah, Yunip Mudjati. 2017. "Kemampuan Informasi Komponen Arus Kas Dan Laba Dalam Memprediksi Arus Kas Masa Depan." *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis* 12 (2): 161-70. <https://doi.org/10.26533/eksis.v12i2.105>.
- Sugiyanto, Hari. 2020. "Analisis Investasi Pemerintah Pusat Pada Lembaga Keuangan Internasional." *Financial:*

- Jurnal Akuntansi* 6 (2): 179–87.
<https://doi.org/10.37403/financial.v6i2.162>.
- Suranta, Sri. 2015. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Investasi Pemerintah" 3 (1).
- Susantao, Susaunto, and I Dewa Gde Bisma Hery. 2010. "Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun Anggaran 2003 – 2007." *Ganeç Swara* Vol. 4 (3): 75–86.
- Susmonowati, Trinik. 2018. "Economic Value Added (Eva) Sebagai Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Industri Telekomunikasi Suatu Analisis Empirik." *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 1 (1): 101–19.
<https://doi.org/10.31334/trans.v1i1.142>.
- Trianto, Anton, Program Studi, Akuntansi Politeknik, and Darusalam Palembang. 2017. "Analisis Laporan Keuangan Sebagai Alat Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Pt. Bukit Asam (Persero) Tbk Tanjung Enim" 8 (03).
- Triharyati, Eri, and Emma Nursita. 2020. "Kajian Penerapan Akuntansi Sumber Daya Manusia Terhadap Laporan Laba Rugi Dan Neraca Di PT. BPR Sindang Binaharta Kota Lubuklinggau." *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi Islam (Jam-Ekin)* 3 (1).
- Wati, Kadek Desiana, Nyoman Trisna Herawati, and Ni Kadek Sinarwati. 2014. "Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, Dan SAKD Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah." *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha* 2 (1): 1–11.
- Wijayantini, Bayu, and Maheni Ika Sari. 2018. "Mengukur Kinerja Keuangan Dengan EVA Dan MVA." *Benefit: Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 3 (1): 68.
<https://doi.org/10.23917/benefit.v3i1.5772>.
- Yani, Teuku Ahmad, and Teuku Muttaqin Mansur. 2020. "Mewujudkan Keharmonisan Undang-Undang Perseroan Terbatas Dalam Pendirian Perseroan Daerah." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22 (2): 363–78.
<https://doi.org/10.24815/kanun.v22i2.16184>.
- Zulkifli, Zulkifli, Boy Syamsul Bakhri, and Rahmawati Rahmawati. 2019. "Analisis Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Pekanbaru." *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* 16 (1): 1–22.
[https://doi.org/10.25299/jaip.2019.vol16\(1\).2869](https://doi.org/10.25299/jaip.2019.vol16(1).2869).

Internet

- <http://spi-blu.uinjkt.ac.id/?p=1326>.
- <https://bpbumd.jakarta.go.id/web/bumd/CMNTK>
- <https://insight.kontan.co.id/news/ipo-pakuan-didirikan-ali-sadikin-jadi-bumd-dki-jakarta-dulu-dimiliki-paulus-tannos>
- <https://jakarta.bisnis.com/read/20150319/77/413785/dki-ingin-melepas-saham-4-bumd-ini>
- <https://jakarta.bisnis.com/read/20150414/384/422875/pt-ratax-armada-keluhkan-dki-tak-pernah-beri-pmp>
- <https://jakarta.bpk.go.id/tak-bikin-untung-dprd-desak-pemprov-dki-jual-saham-pt-jiexpo-dan-pt-cemani-toka/>
- <https://kemenag.go.id/read/uin-syahid-jadikan-rs-haji-jakarta-sebagai-rumah-sakit-pendidikan-a9gjj>
- <https://megapolitan.kompas.com/read/2015/10/08/07542071/Alasan.Pemprov.DKI.Ingin.Serahkan.RS.Haji.kepada.Kemenag>
- <https://nusantara.rmol.id/read/2022/06/18/537357/meski-untung-pemprov-dki-tetap-ingin-jual-saham-pt-delta-djakarta>
- <https://today.line.me/id/v2/publisher/100546> (dari Kontan co.id)
- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190211155930-8-54840/pemda-dki-ambil-pengelolaan-air-bersih>

